



THE EFFECT OF TRANSPARATION, ACCOUNTABILITY, COMMUNITY PARTICIPATION, INTERNAL CONTROL AND VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTING COMPETENCE ON COMMUNITY EMPOWERMENT IN BETAK VILLAGE KALIDAWIR TULUNGAGUNG

Muhammad Syahrul Hidayat, Elok Fitriani Rafikasari

IAIN Tulungagung

syahrulhidayat195@gmail.com elokfitriani@ymail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the influence of transparency, accountability, community participation, internal control and accounting competence on the empowerment of the Betak village community simultaneously and partially using multiple linear regression. The test method was carried out using primary data by distributing questionnaires and then analyzed using the SPSS 16 application. The results of this study indicate that partially there are two variables that have a significant effect on community empowerment, namely accountability and community participation, while the other three variables have no effect. Meanwhile, the variables of transparency, accountability, community empowerment, internal control and accounting competence simultaneously affect community empowerment with a total effect of 85.3%.*

Keywords: *Transparency, accountability, community participation, internal control, accounting competence*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan sebuah kajian yang menarik untuk diperhatikan terutama dimasa sekarang ini, pada kenyataannya alokasi dana desa memang sering membuat masalah yang besar, Pemendagri No. 113 Pasal 2 tahun 2014 menetapkan bahwa mengelola keuangan perdesaan harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan eksekusi ketertiban dan disiplin anggaran. Sesuai dengan informasi APBDesa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 bahwa terdapat pendapatan desa yang mana pendapatan itu berasal dari pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN, alokasi dana desa yang bersumber dari APBD, bagi hasil pajak atau redistribusi serta bantuan keuangan dengan total pendapatan Per 31 Desember 2019 adalah Rp. 2.331.745.444. yang kemudian dana tersebut digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan sebesar 39,5% atau Rp. 921.633.000, pelaksanaan pembangunan 56,8% atau sebesar Rp. 1.325.281.450, pembinaan kemasyarakatan 1,1% atau Rp. 25.874.4565, pemberdayaan masyarakat 2,1% atau Rp. 49.756.550 dan sisanya 0,4% atau sekitar Rp. 9.200.000, digunakan sebagai penanggulangan bencana.¹

Dalam hal anggaran tersebut pemerintah belum merealisasikan anggaran tersebut untuk pembangunan desa, hal

tersebutlah yang bisa memicu masyarakat menganggap bahwa anggaran APBDesa Betak memiliki penyimpangan, hal ini di buktikan dengan adanya anggaran pembangunan yang belum terealisasi selama satu tahun mengenai pembangunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.325.381.450, selain itu fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu masih adanya pelaksanaan musyawarah desa yang belum maksimal, hal ini di ungkapkan oleh Risya Umami dan Idang Nurodin yang mengemukakan bahwa pemerintah desa dalam pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangan belum sesuai dengan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan musyawarah warga sendiri merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan dan musyawarah desa yang menjadi tanggung jawab warga desa serta merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Didalam penganggaran partisipasi masyarakat berperan penting guna mencegah kebijakan kebijakan yang menyimpang.²

¹ Desa Betak, *Anggaran Desa*. dalam <http://betak.tulungagungdaring.id> di akses pada 8 September 2020

² Presiden Republik Indonesia, *Salinan peraturan pemerintah. Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2014)

Sebagai upaya dari pemerintah desa transparansi dan akuntabilitas di capai melalui pengumuman anggaran dan realisasi anggaran pada baliho desa. Hal tersebut bertujuan untuk memberitahu publik tentang keuangan yang dikelola desa. Transparansi dan akuntabilitas itu dianggap penting, karena dana yang dikelola tersebut digunakan untuk seluruh komunitas, namun banyak desa belum mengimplementasikan kegiatan ini dan tidak ada upaya lain untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tingkat desa. Karena itu, desa itu dianggap belum memenuhi rencana dan kebijakan yang telah dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan. Prinsip yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, di Dalam desa Betak sebagai upaya terwujudnya partisipasi masyarakat, masyarakat sendiri biasanya dilibatkan dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh desa.

Selain itu kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa juga menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan baik,³ namun tidak hanya itu sistem pengendalian internal juga dapat mendukung keberhasilan akuntabilitas desa.⁴ Kelemahan dalam pengendalian internal terdapat pada organisasi atau institusi, yang memiliki operasi yang lebih kompleks, skala yang lebih kecil dan

keuntungan yang lebih rendah.⁵ Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur bahwa kepemimpinan instansi pemerintah harus didasarkan pada ukuran, kompleksitas, dan sifat tanggung jawab dan fungsi instansi pemerintah terkait. Menurut pernyataan tersebut, skala dan kompleksitas dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian internal lembaga, dan merupakan faktor yang mempertimbangkan kelemahan pengendalian internal namun kecurangan akuntansi pemerintah dapat diminimalisir dengan memperbaiki sistem pengendalian internalnya.⁶

KAJIAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi adalah asas keterbukaan terhadap hak publik untuk mengakses informasi yang jujur, jujur dan non-diskriminatif mengenai penyelenggaraan suatu organisasi dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak pribadi, golongan dan rahasia negara,⁷ sedangkan Dimensi transparansi adalah keberadaan masyarakat, akses informasi dan

³ Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. Accruals Quality and Internal Control over Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol. 82 No. 5, 2007, pp.1141–1170.

⁴ Ge, W., & McVay, S. The disclosure of material weaknesses in internal control after the Sarbanes - Oxley Act. *Accounting Horizons*, Vol. 19 No. 3, 2005, pp. 137–158.

⁵ Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 44 No.1–2, 2007, pp. 193–223

⁶ Wilopo, Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 2008, hlm. 7-8

⁷ Jubaedah, dkk. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, (Bandung: PKP2AILAN, 2008), hlm. 57-58

transparansi yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan, akses informasi dan keterbukaan tanggung jawab yang jelas.⁸

Akuntabilitas

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menerima dan atau meminta informasi atau kewajiban,⁹ sesuai dengan Undang-undang. No. 6 Tahun 2014 Mengenai indikator akuntabilitas desa ada empat diantaranya yaitu dalam satu tahun anggaran tujuan pengelolaan dana desa harus tercapai, desa harus ikut serta dalam pengelolaan dana desa, dikelola dan diawasi oleh pelaksanaannya. tim dan tanggung jawab harus berada pada pengelola dana pedesaan.¹⁰

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu tindakan, dapat berupa penggunaan kemampuan secara mental, emosional, dan fisik dalam setiap kegiatan yang dilakukan. dan mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab. Bertanggung jawab atas seluruh komitmen.¹¹ Hanif membagi indikator partisipasi masyarakat

menjadi tujuh, yaitu: partisipasi pasif atau manipulatif, partisipasi melalui pemberian informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk rangsangan materi, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan *self mobilization*.¹²

Pengendalian Internal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengendalian internal adalah suatu metode yang memuat seperangkat peraturan dan ketentuan untuk mengelola, mengawasi dan melindungi sumber daya perusahaan guna menghindari segala bentuk penyalahgunaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau agar kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan indikator pengendalian intern sudah sesuai dengan UU Pasal 3 Ayat 1 PP No. 60 tahun 2008, yaitu Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.¹³

Kompetensi Akuntansi

McClelland dalam Sagala dan Rivai mengartikan kompetensi sebagai sifat dasar individu yang secara langsung mempengaruhi atau dapat memprediksi hasil yang sangat baik.¹⁴ Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang lebih sering dilakukan oleh orang yang berkinerja luar

⁸ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 73

⁹ Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*. (Makasar: Graha Ilmu, 2011), hlm. 89

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, *salinan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2008)

¹¹ Adi Uceng, Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*. Vol. 5 No.2, 2019, hlm. 22

¹² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 88

¹³ Presiden Republik Indonesia, *Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*

¹⁴ Rivai dan Sagala, *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 94

biasa dalam lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang yang berkinerja rata-rata.¹⁵ Sedangkan indikator kompetensi meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan atau keterampilan, sikap dan minat.¹⁶

Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan sumber daya melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan bagi masyarakat.¹⁷ Sedangkan indikator pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan, kepercayaan, kewenangan dan tanggung jawab.¹⁸

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena diwakili oleh angka-angka dan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu hingga saat ini. research kuantitatif ini juga dilakukan untuk menguji teori atau asumsi sementara dalam

penelitian apakah benar atau tidak.¹⁹ Selain sebagai penelitian yang berbasis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field research), dikarenakan penelitian ini dilaksanakan di lapangan dalam lingkup kehidupan yang nyata.²⁰

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang telah didapatkan setelah melakukan penyebaran kuisioner.²¹ Dibawah ini merupakan hasil dari analisis deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden yang tersaji dalam tabel berikut:

¹⁵ Arif Widyatama, Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2(2), 2017, hlm. 7

¹⁶ Edi Sutisno, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 44

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, salinan peraturan pemerintah No. 6

¹⁸ Erni Tahrir, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*, (Kendari: Universitas Halu Oleo), 2018, hlm. 28

¹⁹ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 2

²⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11

²¹ Elok Fitriani Rafikasari, Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Adopsi Simba Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.05 No.02, 2019, hlm. 151

Tabel 1.
Frekuensi Jawaban Responden

Item	Frekuensi Jawaban					Rata Rata
	5	4	3	2	1	
T1	24	37	4	19	16	3,34
T2	18	33	12	14	23	3,09
T3	18	28	18	16	20	3,08
T4	21	30	10	23	16	3,17
T5	14	32	14	22	18	3,02
T6	20	29	15	20	16	3,17
A1	14	23	20	23	20	2,88
A2	13	35	20	15	17	3,12
A3	25	24	9	19	23	3,09
A4	16	39	14	17	14	3,26
A5	14	23	20	23	20	2,88
A6	13	35	20	15	17	3,12
A7	25	24	9	19	23	3,09
A8	16	39	14	17	14	3,26
P1	12	26	14	23	25	2,77
P2	31	31	12	14	12	3,55
P3	9	27	18	25	21	2,78
P4	14	38	18	15	15	3,21
P5	30	45	10	9	6	3,84
P6	29	48	7	12	4	3,86
P7	12	26	14	23	25	2,77
P8	31	31	12	14	12	3,55
P9	9	27	18	25	21	2,78
P10	14	38	18	15	15	3,21
P11	30	45	10	9	6	3,84
P12	29	48	7	12	4	3,86
P13	30	45	10	9	6	3,84
P14	9	27	18	25	21	2,78
Pi.1	12	26	14	23	25	2,77
Pi.2	31	31	12	14	12	3,55
Pi.3	9	27	18	25	21	2,78
Pi.4	14	38	18	15	15	3,21
Pi.5	30	45	10	9	6	3,84
Pi.6	29	48	7	12	4	3,86
Pi.7	12	26	14	23	25	2,77

Pi.8	31	31	12	14	12	3,55
Pi.9	9	27	18	25	21	2,78
Pi.10	14	38	18	15	15	3,21
KA.1	31	33	21	6	9	3,71
KA.2	15	25	16	19	25	2,86
KA.3	7	33	22	17	21	2,88
KA.4	4	22	24	21	29	2,51
KA.5	8	35	12	20	25	2,81
KA.6	6	38	13	16	27	2,8
KA.7	18	21	16	20	25	2,87
KA.8	17	25	17	18	23	2,95
KA.9	7	33	22	17	21	2,88
KA.10	4	22	24	21	29	2,51
Y1	28	41	17	6	8	3,21
Y2	16	35	15	17	17	3,07
Y3	9	40	22	14	15	3,01
Y4	6	32	22	20	20	3,04
Y5	10	41	12	17	20	2,84
Y6	6	45	13	16	20	3,14
Y7	22	22	17	19	20	3,16
Y8	18	35	13	18	16	3,75
Jumlah	963	1848	844	969	956	176,53
Total	5580					

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa 17% responden memilih kategori 5 (sangat setuju), kategori 4 (setuju) dipilih 33% responden, 15% responden lebih memilih kategori 3 (netral), 18% responden lainnya memilih kategori 2 (tidak setuju) dan kategori 1 (sangat tidak setuju) dipilih 17%. Kategori yang banyak dipilih oleh responden adalah 4 (setuju).

Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur.²² Sedangkan hasil dari pengujian yang dilakukan dengan

menggunakan metode *Pearson Product Moment*. Hasil uji coba instrumen terhadap 30 responden menunjukkan bahwa semua item valid karena $r_{hitung} > 0,361 = r_{tabel}$.

²² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan Spss*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 55

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	Variabel	Item	r hitung
Transparansi (X1)	T1	0,941	Pengendalian Internal (X3)	Pi.1	0,838
	T2	0,818		Pi.2	0,422
	T3	0,818		Pi.3	0,613
	T4	0,909		Pi.4	0,756
	T5	0,883		Pi.5	0,644
	T6	0,851		Pi.6	0,497
Akuntabilitas (X2)	A1	0,864		Pi.7	0,838
	A2	0,692		Pi.8	0,422
	A3	0,872		Pi.9	0,613
	A4	0,871		Pi.10	0,756
	A5	0,864	Kompetensi Akuntansi (X4)	KA.1	0,443
	A6	0,692		KA.2	0,697
	A7	0,872		KA.3	0,704
	A8	0,871		KA.4	0,650
Partisipasi Masyarakat (X3)	P1	0,746		KA.5	0,657
	P2	0,395		KA.6	0,705
	P3	0,660		KA.7	0,855
	P4	0,794		KA.8	0,759
	P5	0,559		KA.9	0,704
	P6	0,454		KA.10	0,650
	P7	0,746	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Y1	0,529
	P8	0,395		Y2	0,644
	P9	0,660		Y3	0,413
	P10	0,794		Y4	0,675
	P11	0,559		Y5	0,798
	P12	0,454		Y6	0,807
	P13	0,559		Y7	0,753
	P14	0,660		Y8	0,848

Uji Reliabilitas

Uji ini berguna untuk mengetahui apakah suatu item pernyataan yang terdapat pada kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* (α) sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dheasey dan dinyatakan reliabel jika α

> 0,60.²³

Instrumen yang handal adalah instrumen

²³Dheasey Amboningtyas, Rita Andhini, Djameludin Malik, Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Kesesuaiannya Pada Laporan Keuangan Umkm Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 16 No. 2, 2019, hlm. 1

yang menghasilkan data yang sama ketika kali untuk target yang sama.
digunakan untuk mengukur secara berulang

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha (α)	Keterangan
Transparasi (X1)	0,958	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,953	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,904	Reliabel
Pengendalian Internal (X4)	0,892	Reliabel
Kompetensi Akuntansi (X5)	0,912	Reliabel
Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0,895	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa $\text{sig}=0,092 > 0,05 = \alpha$ yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolenearitas

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai VIF untuk variabel transparasi sebesar 2,013, akuntabilitas sebesar 2,506, partisipasi masyarakat sebesar 2,821, pengendalian internal sebesar 2,445 dan kompetensi Akuntansi sebesar 1,537. Dari kelima variabel independen tersebut tidak terjadi masalah multikolenearitas karena $VIF \leq 10$.

3. Uji Autokolerasi

Pengujian ini berguna dalam menemukan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan SPSS versi 16 dengan metode Durbin Watson (*DW test*) di mana kriterianya jika $dU < DW < 4 - dU$ maka tidak terjadi autokorelasi. Dari hasil analisis diperoleh nilai DW sebesar 1,964 dan untuk mendapatkan nilai dU harus melihat tabel DurbinWatson dengan menggunakan $(k : n) ; (5 : 100)$ maka

nilai dU adalah 1,7804. Sehingga ($dU < DW < 4 - dU$) ; ($1,7804 < 1,964 < 2,2196$) maka kesimpulannya tidak ada masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berguna untuk melihat ada tidaknya kesamaan varian dari residual satu ke pengamatan-pengamatan lainnya. Pengolahan uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi SPSS versi 16 dengan uji Park di mana hasilnya menunjukkan nilai Sig. Transparasi sebesar 0,287, akuntabilitas 0,066, partisipasi masyarakat sebesar 0,504, pengendalian internal sebesar 0,166 dan kompetensi akuntansi sebesar 0,766. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dari kelima variabel karena memiliki nilai Sig. lebih dari 0,05.

Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi yang dihasilkan adalah $Y = 0,224 + 0,064X_1 + 0,562X_2 + 0,146X_3 + 0,079X_4 + 0,019X_5$ dimana semua variabel mempunyai nilai koefisien positif, dalam artian bahwa dalam setiap

peningkatan variabel satu satuan makan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebesar koefisien regresinya.

Uji t

Hasil dari uji t ini berguna untuk mengetahui apakah dari masing masing variabel berpengaruh secara parsial terhadap pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Transparasi (X1)	1,014	1,660	0,313	Tidak Signifikan
Akuntabilitas (X2)	10,447	1,660	0,000	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X3)	3,273	1,660	0,001	Signifikan
Pengendalian Internal (X4)	1,460	1,660	0,148	Tidak Signifikan
Kompetensi Akuntansi (X5)	0,486	1,660	0,628	Tidak Signifikan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} dari akuntabilitas 10,447 dengan nilai t_{tabel} adalah 1,660 dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$ begitu juga nilai t_{hitung} dari partisipasi masyarakat 3,273 dengan nilai t_{tabel} adalah 1,660 dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$.

Uji F

Pengujian ini digunakan dalam rangka mengetahui hubungan secara simultan semua variabel terhadap minat beli. Hasil uji Anova diketahui $F_{hitung} = 109,380 \geq 2,47 = F_{tabel}$ dan nilai Sig. = $0,000 \leq 0,05 = \alpha$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan kompetensi kompetensi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS versi 16 Besarnya adjusted R^2 adalah 0,853 Sehingga dapat diketahui bahwa semua variabel bebas berkontribusi bersama sebesar 85,3% terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan sisanya sebanyak 14,2% dijelaskan oleh sebab sebab lain

diluar model atau diluar variabel penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut diatas, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1) Transparasi

Transparasi secara signifikan tidak mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Desa Betak, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Ardianti dimana variabel transparasi berpengaruh signifikan.²⁴ Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat desa akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, namun transparansi tetap dilakukan oleh desa dengan asumsi masyarakat berhak atas pemahaman yang terbuka dan akurat tentang tanggung jawab pemerintah. dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya dengan

²⁴ Rika Ardianti, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi*. Semarang. UIN Walisongo, 2019, hlm. 77

peraturan perundang-undangan.²⁵ Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Aci Relandani disebutkan bahwa seluruh kegiatan yang mencangkup APBDesa tetap harus dipublikasikan ke publik.²⁶

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Weny Ultafitah yang mana variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan.²⁷ Hal ini disebabkan banyaknya tanggapan yang baik dari responden setuju maupun sangat setuju. Sedangkan dalam prakteknya tanggung jawab ini dilakukan oleh perangkat desa dengan memasang spanduk di balai desa dengan pengumuman yang memuat laporan keuangan desa untuk satu masa pemerintahan. Upaya ini dilakukan oleh perangkat desa agar masyarakat dapat mengetahui kesehatan keuangan desa dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) Partisipasi Masyarakat

Secara signifikan, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat hal ini juga

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Sugista yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat,²⁸ hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat pedesaan telah terbukti dapat meningkatkan hubungan positif antara masyarakat pedesaan dan pemerintah desa.

4) Pengendalian Internal

Secara signifikan pengendalian internal tidak mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, hal ini terjadi karena pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik seperti memiliki struktur organisasi yang jelas, adanya tugas dan wewenang dalam pemerintah desa dan juga telah menerapkan penilaian resiko pengendalian maupun pemantauan pengendalian internal.

5) Kompetensi Akuntansi

Kompetensi akuntansi secara signifikan tidak mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mepedulikan kompetensi akuntansi aparatur desa.

6) Secara Simultan

Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Betak.

7) Faktor yang Paling Berpengaruh

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat adalah variabel akuntabilitas, hal ini

²⁵ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2011), hlm. 83

²⁶ Aci Relandani, Fatchur Rohman. *Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 17(01), 2020, hlm. 76

²⁷ Weny Ultafitah, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. *Skripsi*. (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), hlm. 72

²⁸ Rizky Amalia Sugista, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan*. *Skripsi*. (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 44

dibuktikan dengan perolehan nilai BETA 0,653. Nilai BETA akuntabilitas jauh lebih besar dibandingkan empat variabel yang lainnya, hal ini dikarenakan banyaknya jawaban yang setuju dan sangat setuju. dalam bentuk implementasinya, sistem pertanggungjawaban ini diwujudkan oleh pemerintah desa dengan memasang spanduk pengumuman di balai desa, spanduk pengumuman berisi laporan keuangan periode waktu pemerintah berjalan. kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah desa, tujuannya agar masyarakat dapat memahami keadaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sedangkan ketiga variabel yang lainnya tidak berpengaruh. Secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dengan total pengaruh sebesar 85,3% dan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat adalah akuntabilitas. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang lebih luas sehingga dalam pembahasan penelitian tidak sebatas membahas mengenai pengelolaan dana desa, namun semua pengelolaan keuangan yang ada di desa seperti perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu
- Amboningtyas, Dheasey, Rita Andhini, Djamaludin Malik. (2019).

Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Kesesuaiannya Pada Laporan Keuangan Umkm Di Kota Semarang. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 16(2).

- Ardianti, Rika. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo.
- Desa Betak. (2020). *Anggaran Desa*. Available at: <http://betak.tulungagungdaring.id> di akses pada 8 September 2020.
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). *Accruals Quality And Internal Control Over Financial Reporting*. *The Accounting Review*, 82(5), 1141–1170.
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). *Determinants Of Weaknesses In Internal Control Over Financial Reporting*. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1–2), 193–223.
- Ge, W., & McVay, S. (2005). *The Disclosure Of Material Weaknesses In Internal Control After The Sarbanes -Oxley Act*. *Accounting Horizons*, 19(3), 137–158.
- Hasan, I. (2012). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jubaedah, dkk. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Peraturan Pemerintah Indonesia. Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Rafikasari, Elok Fitriani. (2019). *Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Adopsi Simba Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.05 No.02.
- Relandani, Aci, Fatchur Rohman. (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 17(01).
- Rivai, Sagala. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sarmanu. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan Spss*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugista, Rizky Amalia. (2017). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan*. Skripsi. Lampung. Universitas Lampung.
- Sutrisno,Edi. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tahrir, Erni. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2011). *Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Uceng, Adi. (2019). *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Jurnal Moderat. 5(2).
- Ultafitah, Weny. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi. Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Umami, Risyia. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. 6(11).
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Widyatama, Arif. (2017). *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 2(2), 7.
- Wilopo. (2006). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.